

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
REHABILITASI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI NAGARI KAJAI
PASAMAN BARAT**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas



Disusun Oleh:

APRIZON ZUHDI

2020112077

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Yuslim, S.H.,M.H

Dr. Khairani, S.H.,M.H

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA REHABILITASI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI NAGARI KAJAI PASAMAN BARAT

(Aprizon Zuhdi, 2020112077, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2024)

ABSTRAK

Bencana alam seakan menjadi peristiwa dan berita keseharian di Indonesia, bahkan dunia. Berbagai bentuk bencana yang menimpa kehidupan alam dan manusia telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian moril maupun materiil. Banyak Provinsi di Indonesia yang rawan bencana alam. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satunya. Adapun dari 19 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman Barat, bencana gempa bumi 25 Februari 2022 yang berpusat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat menjadi peristiwa bencana berdampak besar khususnya Kecamatan Talamau. Sebagai pusat terjadinya gempa, Kecamatan Talamau menjadi daerah terdampak paling parah. Tercatat Sebanyak 25 orang tewas dan 465 orang mengalami luka-luka, dari 25 orang yang tewas tersebut 14 orang warga Pasaman Timur dan selebihnya merupakan warga Pasaman Barat. Selain kerugian immaterial (korban tewas dan luka-luka), gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat juga mengakibatkan kerugian material seperti adanya fasilitas-fasilitas umum yang mengalami rusak berat, sekolah-sekolah dan rumah ibadah (Masjid). Atas peristiwa bencana tersebut ribuan warga Pasaman Barat menunggu bantuan pembangunan dari pemerintah, akan tetapi bantuan yang diharapkan masih ditunda-tunda untuk segera direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menjawab persolan demikian perlu dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat? Kedua, bagaimana kendala pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah Pasaman Barat melaksanakan kegiatan rehabilitasi, kegiatan ini salah satunya berupa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena dampak dari bencana, Pembangunan tersebut dilakukan dengan melalui tiga sistem, yaitu: reinbuse mandiri, reinbuce fasilitator, dan swasembada mandiri. Dalam upaya menjalankan kewenangannya untuk melakukan rehabilitasi pasca bencana, Pemerintah Daerah mendapati kendala, diantaranya adalah temuan APIP bahwa adanya kekeliruan dalam hal pendataan rumah korban bencana yang mengharuskan pendataan kembali sehingga memakan waktu lagi yang cukup lama dan kemampuan keuangan daerah yang kurang memadai.

Kata kunci: Pelaksanaan Kewenangan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Rehabilitasi Pasca Bencana Alam

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITY IN POST-EARTHQUAKE REHABILITATION EFFORTS
IN NAGARI KAJAI WEST PASAMAN**

*(Aprizon Zuhdi, 2020112077, Master of Law Study Program, Faculty of Law,
Andalas University, 2024)*

ABSTRACT

Natural disasters seem to be daily events and news in Indonesia, and even the world. Various forms of disasters that have befallen natural life and humans have caused enormous losses, both moral and material losses. Many provinces in Indonesia are prone to natural disasters. West Sumatra Province is one of them. Of the 19 regencies in West Sumatra Province, namely West Pasaman Regency, the earthquake disaster on February 25 2022 which was centered in Talamau District, West Pasaman Regency was a disaster event that had a major impact, especially in Talamau District. As the epicenter of the earthquake, Talamau District was the worst affected area. It was recorded that 25 people were killed and 465 people were injured, of the 25 people who died, 14 were residents of East Pasaman and the rest were residents of West Pasaman. Apart from immaterial losses (deaths and injuries), the earthquake that occurred in West Pasaman Regency also resulted in material losses such as heavily damaged public facilities, schools and houses of worship (mosques). Due to this disaster, thousands of West Pasaman residents are waiting for development assistance from the government, but the expected assistance is still being delayed before it can be realized immediately by the Regional Government. To answer such a problem, it is necessary to formulate it into two problem statements. First, how is the implementation of regional government authority in post-earthquake rehabilitation efforts in Nagari Kajai, West Pasaman Regency? Second, what are the obstacles to implementing Regional Government Authority in post-earthquake rehabilitation efforts in Nagari Kajai, West Pasaman Regency? This research is a type of normative legal research or doctrinal legal research. The results of this research show that as a form of disaster management, the West Pasaman Regional Government carries out rehabilitation activities, one of these activities is in the form of providing assistance to repair houses for people affected by the disaster. This development is carried out through three systems, namely: independent reinbuce, facilitator reinbuce, and self-sufficiency. In an effort to exercise its authority to carry out post-disaster rehabilitation, the Regional Government encountered obstacles, including APIP's finding that there was an error in collecting data on houses of disaster victims which required data collection again, which took quite a long time and the regional financial capacity was inadequate.

Keywords: *Implementation of Authority, Regional Government Authority, Regional Government, Post-Natural Disaster Rehabilitation*

